

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syapruddin, S. Ag.

Jabatan : Kasubbag Perencanaan Program dan Anggaran

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Meiradinata, S. Ag.

Jabatan : Kabag Perencanaan dan Kepegawaian

selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Meiradinata, S. Ag.

Jambi, 4 Januari 2016

Pihak Pertama

Syapruddin, S. Ag.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target %
1.	Tahap persiapan penyusunan perencanaan.		
	a. Terciptanya persiapan yang baik dan matang.	1. Meneliti suatu permasalahan yang ada dan menentukan masalah yang timbul untuk ditindaklanjuti. 2. Mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dasar untuk perencanaan. 3. Mengoreksi data-data yang telah terkumpul untuk menentukan kelayakan dan keakuratan data tersebut. 4. Menetapkan suatu permasalahan yang tepat dan jelas. 5. Melaporkan realisasi anggaran.	100 100 100 100 100
	b. Terlaksananya perencanaan yang baik, tepat, dan terarah dengan berpedoman pada renstra.	1. Menyusun rencana penggunaan dana dalam DIPA sesuai dengan mata anggaran pengeluaran. 2. Menetapkan jadwal pelaksanaan anggaran DIPA. 3. Membagi persentase pelaksanaan anggaran secara berkala. 4. Menentukan target pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana.	100 100 100 100
	c. Terselenggaranya perencanaan program anggaran berdasarkan tahapan-tahapan.	1. Menetapkan objek yang akan diteliti untuk mencari permasalahannya. 2. Menetapkan suatu permasalahan terhadap objek yang akan menimbulkan suatu wacana untuk perlunya diadakan perencanaan. 3. Menetapkan perencanaan terhadap suatu objek yang telah disepakati untuk ditindaklanjuti. 4. Menetapkan output terhadap objek yang direncanakan untuk diusulkan berdasarkan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari konsultan perencanaan.	100 100 100 100

2.	<p>Terlaksananya usulan perencanaan dengan baik dan tepat.</p> <p>a. Terhimpunnya data-data yang akurat.</p>	<p>1. Pengumpulan data-data dari seluruh satker dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.</p> <p>2. Penelitian atas data-data yang telah terkumpul untuk menentukan apakah data tersebut sudah memenuhi syarat untuk dibuat perencanaannya.</p> <p>3. Membuat usulan perencanaan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian terhadap suatu objek yang telah didapati suatu permasalahan bahwa objek tersebut harus segera tindaklanjuti.</p> <p>4. Menyampaikan usulan kepada Badan Urusan Administrasi cq. Biro Perencanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik usulan dari Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Pengadilan Agama Sewilayah PengadilanTinggi Agama Jambi.</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
3.	<p>Terlaksananya realisasi anggaran yang tepat, benar dan terarah.</p> <p>a. Pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran.</p> <p>b. Evaluasi pelaksanaan realisasi anggaran.</p>	<p>1. Pelaksanaan realisasi anggaran harus dipandang sesuai dengan tahapan-tahapan.</p> <p>2. Pelaksanaan realisasi anggaran harus mempunyai target waktu yang telah ditentukan.</p> <p>1. Pelaksanaan realisasi anggaran harus dievaluasi sejauh mana pelaksanaan tersebut sudah terlaksana.</p> <p>2. Pelaksanaan anggaran apa sudah melalui tahapan-tahapan dan apa sudah sesuai dengan persentase pencairan.</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>

	c. Pelaporan pelaksanaan realisasi anggaran.	1. Setiap kegiatan pelaksanaan realisasi anggaran harus melaporkan hasil kegiatan tersebut ke Bappenas.	100
--	--	---	-----

Pihak Kedua



Meiradinata, S. Ag.

Jambi, 4 Januari 2016

Pihak Pertama



Syapruddin, S. Ag.